

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta aktif lembaga keuangan yang berada di daerah kredit. Peran aktif dalam lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian, yaitu selain sebagai yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan, bank juga mempunyai peran untuk menyalurkan kembali dana yang dihimpun kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit.

Dalam pemberian kredit, bank tidak terlepas dari suatu hambatan. Terkadang pembayaran yang dilakukan mengalami kemacetan (kredit macet) atau tidak terbayarkan.

Dengan adanya kredit maka memberikan pendapatan bagi bank. Kredit adalah sumber pendapatan terbesar bank dan merupakan kegiatan yang memiliki nilai asset terbesar dibandingkan dengan operasional bank yang lain. Peningkatan pemberian kredit oleh bank akan dapat meningkatkan pendapatan, yaitu berupa bunga bank atas kredit yang diberikan. Namun disamping itu peningkatan pemberian kredit juga akan diikuti oleh tingginya tingkat resiko bagi bank. Resiko tersebut adalah tidak tertagihnya kredit nasabah. Tidak tertagihnya kredit ini akan menjadi sebuah ancaman jika pihak perbankan segera mengambil langkah penyelesaian. Dalam usaha pencegahan tidak tertagihnya kredit, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen bank yaitu menerapkan sistem

pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya khususnya pada persetujuan pemberian kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah disuatu bank, pengendalian intern harus dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya. Karena pengendalian intern yang baik ini akan sangat membantu organisasi dalam menghindari adanya *fraud* atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah serta bank (organisasi) itu sendiri.

Menurut Ratna Bintari dkk., (2013:1) Manfaat kredit bagi bank utamanya yaitu: Untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, hal ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

Jika membahas tentang kredit maka termasuk membahas unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Pengendalian intern kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan utama dari pengendalian intern kredit suatu bank adalah untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali, mengetahui posisi presentase yang dilakukan bank dan meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan.

Efektivitas pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* menyangkut keuntungan dari bunga kredit, sedangkan *safety* menyangkut kelancaran dari pengembalian kredit. Apakah memiliki keuntungan dari bunga kredit dan debitur teratur dalam mengembalikan kreditnya kepada bank maka dapat dikatakan pengendaliannya *efektif*.

Disamping itu, apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur-unsur pengendalian internalnya. Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian internalnya yang efektif. Ini akan tercermin dalam tingkat kolektabilitas yang dicapai.

Pengendalian intern yang telah disusun harus ditaati dan dilaksanakan. Untuk menjamin bahwa pengendalian intern telah dilaksanakan dengan *efektif*, perlu dilakukan suatu penilaian terhadap pengendalian intern. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan adanya keamanan bank dalam pemberian kredit. Pemberian kredit yang aman akan memberikan dampak positif bagi bank, sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah.

Salah satu peran bank yaitu memberikan fasilitas berupa kredit kepada nasabahnya, baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Kredit merupakan fasilitas berupa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan yang memungkinkan nasabah baik perorangan maupun badan usaha meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau modal usaha. Pihak peminjam akan melunasi utangnya beserta bunga pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan kegiatan yang memiliki nilai asset terbesar dibandingkan dengan operasional bank yang lain. Dengan adanya

peningkatan pemberian kredit maka akan meningkatkan pendapatan bank pula yang berasal dari bunga bank atas pemberian kredit yang telah diberikan. Peningkatan dalam pemberian kredit merupakan sumber utama penghasilan terbesar bank karena adanya bunga pinjaman dari pemberian kredit, sekalipun bank mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa dan perbankan lain. Namun disisi lain kredit juga merupakan sumber resiko bagi bank.

PT. BRI (Persero) Tbk KCP Sidorame, merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dananya kepada masyarakat dan dana yang diberikan adalah berupa kredit. PT. BRI Sidorame menerapkan prosedur dan kebijakan dengan baik dalam pemberian kredit, namun disisi lain terdapat masalah yang dialami PT. BRI Sidorame. Kredit bermasalah ini digolongkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Adapun data yang diterima dari perusahaan terkait dengan kolektabilitas kredit modal usaha Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
DAFTAR KOLEKTABILITAS KREDIT
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
UNIT SIDORAME TAHUN 2019 DAN 2020

NO	KETERANGAN	2019			2020		
		Deb	Rupiah	%	Deb	Rupiah	%
1	Lancar	3,213	120,512,490,606	95.86%	4,170	147,716,164,448	97.35%
2	Dalam Perhatian Khusus	176	4,207,178,938	3.35%	136	2,562,381,943	1.69%
3	Kurang Lancar	11	123,103,291	0.10%	9	131,874,133	0.09%
4	Diragukan	25	400,432,941	0.32%	12	98,352,573	0.06%
5	Macet	22	478,701,052	0.38%	63	1,227,963,947	0.81%
TOTAL		3,447	125,721,906,828		4,390	151,736,737,044	

Sumber: PT.BRI (PERSERO) Tbk Unit Sidorame

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kolektabilitas Kredit Modal Usaha pada PT.BRI (PERSERO) Tbk Unit Sidorame pada tahun 2019 sebesar 95,86% dan jumlah kredit DPK (Dalam Perhatian Khusus) sebesar 3,35% dan untuk kredit bermasalah adalah 0,8% yang terdiri dari jumlah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Sedangkan pemberian kredit modal usaha pada tahun 2020 pada PT.BRI (PERSERO) Tbk Unit Sidorame sebesar 97,35% jumlah kredit (DPK) Dalam Perhatian Khusus adalah sebesar 1,69% dan jumlah kredit bermasalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,96%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sidorame bahwa BRI Unit Sidorame masih memiliki adanya kredit bermasalah sebesar 0,8% ditahun 2019 dan meningkat menjadi 0,96% pada tahun 2020. Untuk itu perlu penanganan kredit bermasalah pada BRI Unit Sidorame dalam mencegah timbulnya peningkatan untuk tahun selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BRI KCP SIDORAME”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan suatu perusahaan mengharuskan manajemen mampu mengawasi jalannya operasi secara efektif. Permasalahan merupakan faktor yang menghambat kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut Moh Nazir (2014:96) Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah

(*gap*), baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, maka permasalahan yang akan di uji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Pada PT.BRI KCP SIDORAME.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT BRI KCP SIDORAME.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi penulis adalah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah khususnya mengenai analisis efektivitas pengendalian intern pemberian kredit pada PT BRI Kantor Cabang Pusat Sidorame.
2. Bagi perusahaan adalah untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan tentang penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dalam meningkatkan kualitas kredit dan penagihan sehingga dapat dihasilkan kredit yang berkualitas.
3. Bagi peniliti selanjutnya, penelitian adalah untuk dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberian Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Dalam meningkatkan kegiatan usahanyasehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit, bank dituntut agar mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga cukup untuk menutupi seluruh biaya seperti overhead dan biaya operasional lainnya. Pendapatan dana yang menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun demikian dengan resiko yang dihadapi oleh bank harus berhati-hati dalam penempatan dana dalam bentuk kredit

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Selain memberikan kontribusi pendapatan bunga tertinggi bagi pendapatan bank, resiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga sangat tinggi. Oleh karena itu, penyajian secara akurat dan berkala tentang perkreditan menjadi sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan.

Menurut Hamonangan siallagan (2019:87) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefenisikan sebagai Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Taswan (2008:226) Kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikatan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur.

Bank dapat memberikan kredit apabila dapat memiliki dana, atau tagihan yang sama dengan itu, bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu, maupun agunan. Dengan ditandatangani perjanjian kredit berarti bank dan debitur telah terkait untuk melaksanakan. Bagi bank persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu saja bagi debitur, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin besar risikonya.

2.1.2 Manfaat Dan Tujuan Kredit

Kebutuhan manusia beranekaragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuannya untuk mencapai suatu yang diinginkan terbatas.

Menurut Ismail (2010:97) manfaat pemberian kredit sebagai berikut:

1) Manfaat Kredit bagi Bank

- a. Kredit yang berikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa beberapa bunga
- b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank

- c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.

2) Manfaat kredit bagi Debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah
- c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya

3) Manfaat kredit bagi pemerintah

- a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendalian moneter
- c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Manfaat Kredit bagi Masyarakat Luas

- a. Mengurangi tingkat pengangguran
- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal independen, dan asuransi
- c. Penyimpan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya

Menurut Thamrin dan Francis (2014:166) Tujuan Kredit antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
- b. Membantu usaha nasabah: tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usaha.
- c. Membantu pemerintah: bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.3 Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebutkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Menurut Hamonangan Siallagan (2019:88) jenis kredit yang diberikan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Jenis kredit menurut bentuknya

a) Kredit Rekening Koran

Debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai besar dengan sebesar *plafond* yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet (*outstanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.

b) *Installment Loan*

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *Installment* angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya

- a. Kredit Jangka Pendek yaitu Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun
- b. Kredit Jangka Menengah yaitu Kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang yaitu Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit perumahan, kredit kendaraan.

3. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

a) Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

b) Kredit Investasi

Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya.

c) Kredit Konsumsi

Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan. Contoh: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Modal (KPM).

2.1.4 Unsur-unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Menurut Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati (2020:64) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak sengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengambilan suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provinsi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

2.1.5 Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.

Menurut Kasmir (2006:106) fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

- a) Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
- b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c) Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau manfaat.
- d) Untuk meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

2.1.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikam benar-benar akan kembali. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Menurut *Kasmir (2006:106)*, dalam jurnal Badan dan Lemabaga Keuangannya Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank dengan analisis 5C dan 7P yaitu:

Menurut *Kasmir (2006:106)* Prinsip Kredit dalam analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity*, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, merupakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan

solfabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang dapat diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Menurut *Kasmir (2006:106)* Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- 3) *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.
- 4) *Prospect*, yaitu untuk menilai apakah usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.
- 5) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- 6) *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*, yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan suatu permohonan kredit

Menurut *Mulyadi (2016:4)*, dalam buku Sistem Akuntansi. Prosedur Pemberian Kredit sebagai berikut: “Prosedur adalah suatu ukuran kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan ke-aslian dokumen.

Tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut *Mulyadi (2016:4)*, dalam buku Sistem Akuntansi secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Proposal
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman

- 3) Penilaian kelayakan kredit
- 4) Wawancara pertama
- 5) Peninjauan ke lokasi
- 6) Wawancara kedua
- 7) Keputusan kredit
- 8) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
- 9) Realisasi kredit.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit antara lain:

1. Prosedur Permohonan Kredit
 - a. Pemohon menghubungi bank pelaksana.
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan kredit.
2. Prosedur Verifikasi permohonan
 - a. Permohonan Kredit dimasukkan ke bagian kredit untuk verifikasi
 - b. Diteliti oleh petugas analisis kredit
 - c. Dimintakan persetujuan Kepala Bagian Kredit
3. Prosedur Pemberitahuan Penolakan
 - a. Petugas analisis kredit menilai bahwa permohonan kredit dianggap tidak layak
 - b. Petugas mendatangi pemohon kredit untuk memberitahu alasan penolakan kredit. Pemberitahuan juga dapat dilakukan melalui surat.
 - c. Kredit yang ditolak dapat diproses kembali apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi.
4. Prosedur Pemrosesan Persetujuan
 - a. Bagian administrasi mengetik warkat kredit

- b. Dimintakan verifikasi kepada staf administrasi kredit
 - c. Dimintakan otorisasi direksi dan kabag. Marketing
 - d. Nasabah menyerahkan syarat-syarat kelengkapan kredit
 - e. Nasabah menandatangani perjanjian kredit dan dokumen pendukungnya
5. Prosedur Pencairan Kredit
- a. Syarat-syarat kelengkapan kredit diteliti kebenarannya oleh bagian administrasi
 - b. Bagian administrasi menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada kasir
 - c. Bagian kasir membuat kwitansi dan mengeluarkan uang
 - d. Nasabah menandatangani kwitansi pinjaman, menerima uang dan dokumen-dokumen yang diserahkan.

2.2 Efektivitas Pengendalian Intern Kredit

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Menurut Rusliaman Siahaan (2015:113) efektivitas merupakan tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan.

Dari efektivitas tersebut maka efektivitas dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menunjukkan keberhasilan dari suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses

dann ouput yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas,kuantitas dan waktu) telah dicapai,serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Outcome pada bank berupa jumlah bunga yang diterima oleh bank dari pemberian kredit dan yang menjadi output pada bank berupa pemberian kredit terhadap nasabah. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

2.2.2 Pengertian Efektivitas Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern memiliki lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan. Komponen-komponen pengendalian internal ini merupakan suatu proses pencapaian yang akan dilakukan oleh pihak organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2016:135), dalam buku Sistem Akuntansi. Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi Konsep yang terkandung dalam definisi ini adalah:

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan untuk tujuan itu sendiri.

2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personel lainnya.
3. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan penuh
4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi.

Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat yang meliputi berbagai aspek mengenai peminjam, untuk memutuskan apakah layak diberikan kredit atau tidak. Selanjutnya prinsip-prinsip keputusan kredit yang sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C yang meliputi karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi dan terwujudnya sistem pemberian kredit yang efektif.

Efektivitas pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu *Profitability* dan *safety*. Disamping itu, apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur pengendalian internalnya.

Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai.

Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian intern sudah memadai akan mengingatkan pelaksanaan keputusan kredit yang baik dan akan

mengurangi terjadinya kredit yang bermasalah atau disebut juga dengan kredit macet.

2.3 Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang di patuhi untuk meningkatkan lingkungan dalam upaya mencapai tujuan dan menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Comite of Sponsoring Organization (COSO) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan seluruh staf dan karyawan yang berada dibawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan beberapa pertimbangan meliputi:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian intern merupakan suatu teknik pengawasan yaitu pengawasan secara keseluruhan dari aktivitas perusahaan, baik mengenai organisasi perusahaan maupun sistem yang digunakan untuk menjalankan perusahaan tersebut dan tidak terkecuali alat-alat yang digunakan oleh perusahaan.

Menurut Mulyadi (2016:129) Pengendalian Intern adalah Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.3.2 Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Kredit merupakan pendapatan umum dari suatu bank. Jika pemberian kredit dilakukan secara tidak hati-hati maka akan terjadi kredit macet. Kredit macet bagi suatu bank merupakan masalah yang harus dihindari, karena akan menjadi kerugian bagi suatu bank. Salah satu cara untuk menghindari kredit macet adalah dengan adanya pengendalian intern pemberian kredit pada bank tersebut.

Menurut Munawaroh (2011:76-82), dalam jurnal Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Pengendalian Intern Pemberian Kredit yaitu Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Dalam hal ini digunakan prinsip perkreditan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*. Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Disamping itu perlu dilaksanakan prosedur pemberian kredit yang meliputi permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencarian kredit. Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan.

Pemberian intern pemberian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif

maksudnya adalah kredit tersebut dapat ditarik kembali bersama dengan bunganya sesuai dengan jadwal dan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

2.3.3 Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Menurut *Malayu S.P Hasibuan (2008:10)* tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
- 2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
- 3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- 6) Mengetahui posisi presentase collectability credit yang disalurkan bank.
- 7) Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank.

2.3.4 Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian internal memiliki 5 komponen pengendalian internal yang saling berkaitan. Komponen-komponen pengendalian internal ini merupakan suatu proses pencapaian yang akan dilakukan oleh pihak organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan

efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum peraturan yang berlaku. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen.

Menurut *Mulyadi (2002:183-195)*, dalam buku *Auditing I* Komponen Pengendalian Intern terbagi 5 komponen yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yaitu:

- a) Nilai Integritas dan etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Dewan komisaris dan komite audit
- d) Filosofi dan gaya operasi manajemen
- e) Struktur organisasi
- f) Pembagian wewenang dan pembedaan tanggungjawab
- g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Dalam standar pekerjaan lapangan kedua, auditor harus memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan pengendalian internal yang diterapkan didalam entitas. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian internal entitas.

Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.

b. Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penaksiran resiko yang terkandung dalam aserasi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditunjukkan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

- a) Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
- b) Perubahan standar akuntansi
- c) Hukum dan peraturan baru

Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat didalam fungsi tersebut.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktvitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal

e. Pemantuan (*Monitoring*)

Pemantuan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantuan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengendalian pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karean terjadinya perubahan keadaan.

2.3.5 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat pokok yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c) Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.3.6 Kriteria Pengendalian Intern Pemberian Kredit yang Efektif

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern kredit menurut Tjukria P.Tawah adalah:

1. Harus ada sistem pengendalian yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan transaksi angunan.
2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum) ketentuan mengenai tingkat bunga dan provinsi ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur konsentrasi kredit dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.
3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit dikoperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta ketrampilan yang memadai dalam mengenai permasalahan dan penanganannya

4. Harus ada fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan *review* serta memantau tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern dalam pemberian kredit adalah:

1. Pemisah fungsi antara pejabat yang terkait
2. Kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap pemberian kredit
3. Pejabat yang kompeten dibidangnya
4. Review terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara terus menerus.

2.3.7 Karakteristik Pengendalian yang Efektif

Menurut *Siswanto H.B. (2018:139)*, dalam buku Pengantar Manajemen. Karakteristik Pengendalian yang Efektif seperti yang telah dibahas terdahulu bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Dengan demikian, pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar.

Pengendalian sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem-sistem yang lain memiliki karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting karakteristik itu pun berbeda pula. Pada kondisi yang sama, karakteristik tersebut berlaku sama.

Menurut *Siswanto H.B. (2018:139)*, dalam buku Pengantar Manajemen secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2. Tepat Waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*)

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinan bahwa individu segera sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi di antara para karyawan.

4. Dipusatkan pada Tempat Pengendalian Strategis (*Focused on Strategic Control Points*)

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem

pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

6. Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*)

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistic. Perbedaan status di antara individu harus dihargai juga.

7. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (*Coordinated with the Organization's Work Flow*)

Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena kedua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

8. Fleksibel (*Flexible*)

Pada setiap organisasi pengendalian harus mengundang sifat fleksibel yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9. Preskriptif dan Operasional (*Prescriptive and Operational*)

Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10. Diterima Para Anggota Organisasi (*Accepted by Organization Members*)

Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan.

2.3.8 Jenis-Jenis Pengendalian

Menurut *Siswanto H.B. (2018:143)*, dalam buku Pengantar Manajemen. Jenis-jenis Pengendalian Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari sistem maupun waktu pelaksanaannya. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Sistem Pengendalian Umpan Balik

Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran

menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang ditetapkan. Pengendalian ini memantau operasi proses maupun masukan dalam suatu usaha untuk menerka penyimpangan yang potensial agar tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan guna mencegah permasalahan kompleks menimpa organisasi.

Sistem pengendalian umpan balik biasanya terdiri atas lima komponen berikut:

- a) Proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran
- b) Karakteristik proses yang merupakan subjek penelitian.
- c) Sistem pengukuran yang menentukan kondisi dan karakteristik.
- d) Serangkaian standar atau kriteria dimana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi.
- e) Pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan.

2. Sistem Pengendalian Umpan Maju

Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpangan yang memakan biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif dilaksanakan. Hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada

permasalahan tersebut mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi.

Sistem pengendalian umpan maju memiliki komponen yang sama dengan sistem pengendalian umpan balik, yaitu:

- a. Proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran.
- b. Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian
- c. Sistem pengukuran yang menentukan kondisi karakteristik
- d. Serangkaian standar atau kriteria dimana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi.
- e. Pengatur yang fungsinya untuk mengoperasikan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan.

3. Sistem Pengendalian Pencegahan

Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan diatas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian umpan maju, berfungsi secara ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlibat dalam mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sistem pengendalian pencegahan adalah kebijakan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Pengendalian pencegahan merupakan pengendalian intern organisasi.

Menurut *Siswanto H.B. (2018:143)*, dalam buku Pengantar Manajemen. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengendalian dapat dibedakan menjadi empat jenis pokok yaitu:

1. Pengendalian Sebelum Tindakan (*Preaction Controls*)

Pengendalian sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan (*precontrol*). Pengendalian memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai maka sumber daya manusia, bahan, dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan. Dengan demikian, apabila kegiatan dilakukan, sumber daya tersebut tersedia, baik jenis, kualitas, kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya digunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan maupun sebagai penunjang sarana produksi tertentu.

2. Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*)

Istilah pengendalian ini berasal dari sistem kemudi sebuah mobil. Dimana sopir mengemudikan mobilnya untuk mencegah agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan sebelum suatu urutan kegiatan tertentu diselesaikan.

3. Penyaringan atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or Yes/No Controls*)

Karena pengendalian kemudi merupakan sarana untuk mengambil tindakan perbaikan, sementara suatu program masih berjalan maka pengendalian penyaringan berguna sebagai alat kendali ganda (*double check*) sekaligus menyempurnakan pengendalian kemudi. Pengendalian

ya atau tidak merupakan suatu proses penyaringan yang aspek-aspek spesifik dari suatu prosedurnya harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum aktivitas dapat diteruskan.

4. Pengendalian Setelah Tindakan (*Post Action Controls*)

Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama di masa yang akan datang. Sebelum itu, pengendalian sesudah tindakan juga digunakan sebagai dasar untuk balas jasa untuk memotivasi karyawan, misalnya seorang karyawan yang mencapai standar akan diberikan kompensasi tertentu.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran untuk mendukung kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rotman,Guasmin, dan Dicky Yusuf (2018)	Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada PT.Bank Sulteng	Kualitatif Deskriptif	Analisis sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng menunjukkan bahwa prosedur dari pemberian kredit sesuai dengan prosedur perkreditan secara umum, hal ini dapat dibuktikan dengan saling terorganisirnya

				bagian-bagian yang terlibat dalam pengurusan permohonan kredit, sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng sudah efektif dan terkontrol
2	Hadion Wijoyo (2020)	Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri	Kualitatif Deskriptif	Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra Mandiri yaitu: bahwa pihak bank telah melaksanakan survey sebelum memberikan kredit kepada debitur (Character). Bahwa bank telah melakukan penilaian kelayakan calon debitur baik aspek kemampuan membayar dan tidak memandang latar belakang pendidikan calon debitur (Capacity)
3	Yenni Vera Fibriyanti dan Oktavia Ikke Wijaya (2018)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PD.BPR Bank Daerah Lamongan	Kualitatif Deskriptif	Prosedur Pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank Daerah Lamongan
4	Eka Winda Yuliana dan Hesti Widiyanti (2014)	Sistem Pemberian Kredit Pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal	Kualitatif Deskriptif	Fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah cukup baik karena setiap fungsi selalu bekerja sama dengan baik dan masing-masing bagian mempunyai tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya

5	Ratna Bintari, Mochammad Dzulkrirom, dan Achmad Husaini (2013)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan)	Kualitatif Deskriptif	Fungsi Internal Audit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia, sehingga pemeriksaan secara independen belum dapat terlaksana.
---	--	---	-----------------------	--

Sumber: Data yang diolah dari <https://scholar.google.com/>

Dari penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KCP SIDORAME layak untuk dilaksanakan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

1. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah suatu sarana ilmiah dengan tujuan dan kegunaan untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, karakteristik atau ukuran yang berbeda. Objek yang menjadi pengamatan penelitian ini yaitu Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit. Penelitian ini dilakukan pada PT BRI Kantor Cabang Pembantu Sidorame Medan yang beralamat di jalan Tuasan, sidorejo hilir, kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20222.
2. Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek Penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Unit bagian keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk, KCP Sidorame yang beralamat Jl.Tuasan,Sidorejo Hilir,Kec.Medan Tembung

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif yang berarti desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek peneliti. Yang menjadi obyek penelitian adalah PT BRI Kantor Cabang Pembantu Sidorame, sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk KCP Sidorame.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung dari perubahan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk KCP Sidorame. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah jumlah kredit lancar, kredit DPK, dan kredit kurang lancar, kredit macet pada tahun 2019 dan 2020

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk KCP Sidorame, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Metode Wawancara

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:31) wawancara adalah wawancara adalah proses memperoleh penjelesan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap

muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

Metode Wawancara ini bertanya tentang jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dan syarat dalam memperoleh kredit tersebut, prosedur dalam pemberian kredit, faktor penyebab terjadinya pemberian kredit dan upaya yang dilakukan Bank Raktat Indonesia (PERSERO), Tbk KCP Sidorame dalam menyelesaikan pemberian kredit.

Wawancara ini dilakukan pada kabag pemasaran (marketing) yang menangani kredit. Adapun uraian tugas dari kabag marketing ini adalah sebagai berikut: bertanggungjawab terhadap semua kredit, membuka pasar baru, membuat laporan perkembangan kredit kepada direksi, dan melakukan survey ulang terhadap semua debitur. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan bagian marketing dibidang kredit khususnya dibagian analisis pengendalian intern pemberian kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk KCP Sidorame.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian. Data-data mengenai pemberian kredit yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan seperti daftar kolektabilitas kredit modal usaha tahun 2019 dan 2020, profil perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian

kegiatan dan dokumen lainnya sesuai yang dibutuhkan didalam penelitian ini pada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk KCP Sidorame.

2. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku ilmiah, jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penambahan masalah sebagai dasar perbandingan praktek dilapangan.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif.

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.